



# Pembinaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa di Kabupaten Bolaang Mongondow

Abdul R. Dilapanga<sup>1</sup>, Z.H. Singal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado

<sup>2</sup>Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado

**Abstract.** Village is a legal community unit that has a regional boundary that is authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, the right of origin or traditional rights, which are grew, valid, and still recognized by the community in the government system of Indonesia. For the sake of the effectiveness of the village governance administration, the village government needs to be supported by the lawful village administration. Village administration is very important in managing village activities. The lawful and correct management of village administration is determined by the ability of the village apparatus. Limited resources of the village apparatus will affect the management of village administration. The purpose of this coaching program is to increase the capacity (ability) in the form of knowledge, understanding of government officials in the village administration in implementing the village administration model. In order to achieve these objectives, this coaching program provide a counseling session, mentoring and training to village officials. This activity is conducted for three months, which covers the preparation, implementation, strengthening program and evaluation stages. The results from the evaluation stage indicate that there is a change in the capacity of partner village officials in the management of village administration. The village apparatus highly appreciates and follows the guidance and strengthening of the program through practice using a module contains thirty-two village administration models.

**Keywords:** capacity, coaching program, village apparatus, village administration

## I. PENDAHULUAN

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapih dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistimatis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung dan dipayungi oleh peraturan desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD. Demikian pula dengan pelaksanaan program

pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, di mana rencana pembiayaan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dalam peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Dalam APB Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan, sehingga dipastikan dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka dibutuhkan unsur aparatur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa) yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi desa secara tertib.

Hasil penelitian tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Perspektif Otonomi Desa di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow (Dilapanga, 2013) menunjukkan bahwa: 1) Kinerja BPD belum optimal, 2) Belum optimalnya kinerja BPD disebabkan oleh: kualitas sumber daya manusia (pimpinan dan anggota BPD) sebagian besar berlatar belakang pendidikan SD/SMP, kurangnya kemampuan dan pengetahuan teknis pimpinan dan anggota BPD tentang tata cara pembuatan peraturan desa dan penyusunan APB Desa. Temuan lainnya adalah: 1) Hubungan pemerintah desa dengan BPD belum berjalan secara optimal, 2) Buku Administrasi Desa dan BPD seperti buku anggota BPD, keputusan BPD, data kegiatan BPD maupun buku agenda dan ekspedisi pemerintah desa dan BPD belum tersedia.

Mengingat kompleksnya permasalahan tersebut di atas dan disadari bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan sekaligus dalam kurun waktu tertentu maka



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
ISBN: 978-602-555-459-9**

berdasarkan justifikasi dan kesepakatan bersama dengan pemerintah desa Tadoy dan Tadoy 1 maka dipilih beberapa permasalahan prioritas yang harus diatasi baik mitra 1 maupun mitra 2 yaitu:

1. Desa mitra sebagai desa baru hasil pemekaraan diperhadapkan pada permasalahan pemisahan dan penataan administrasi desa.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah desa mitra tentang sistem administrasi pemerintahn desa.

## II. METODE PELAKSANAAN

Secara metodologis pelaksanaan kegiatan PKM ini dirancang dan akan dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, uji coba, monitoring dan evaluasi yang dirancang dalam empat tahapan kegiatan:

Tahap I Rancangan kegiatan:

- a. Pelatihan kapasitas untuk kegiatan yang dipilih.
- b. Mendampingi desa mitra yang dipilih sebagai daerah sasaran kegiatan
- c. Membuat modul pelatihan (model buku administrasi desa)
- d. Mengaplikan modul pelatihan pada desa sasaran.

Tahap II dengan rancangan kegiatan:

- a. Memberikan penyuluhan tentang esensi administrasi pemerintahan desa
- b. Memperkenalkan model-model buku administrasi desa

Tahap III dengan rancangan kegiatan:

- a. Melakukan pendampingan aparatur desa pada desa mitra
- b. Mengaplikasikan (uji coba) model-model buku administrasi desa pada desa mitra

Tahap IV dengan rancangan kegiatan:

- a. Melakukan monitoring tentang aplikasi model buku administrasi desa
- b. Melakukan evaluasi kegiatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Persiapan

Langkah persiapan yang akan dilakukan oleh pelaksana PKM adalah melakukan persiapan yang didahului dengan pembahasan program dan langkah-langkah kerja sampai dengan persiapan administrasi dan perangkat pendukung. Kegiatan lain yang masuk dalam persiapan adalah melakukan koordinasi dengan kedua pemerintah desa mitra menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan PKM . Selain itu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Bolaang Timur untuk menyampaikan program dan persiapan kegiatan.

Persiapan lainnya adalah menyusun instrumen yang digunakan untuk menjaring informasi tentang

permasalahan mendasar kedua desa mitra. Instrumen yang disusun dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang harus dipahami sebelum mengawali kegiatan ini dengan mengidentifikasi dan mempertajam serta menganalisis kembali faktor-faktor penyebab kedua permasalahan pokok di atas. Hasil identifikasi tersebut di samping menjadi dasar penyusunan rencana kerja sekaligus sebagai landasan pelaksanaan kegiatan PKM Langkah persiapan yang lainnya adalah menyusun draf modul bahan ajar/latih yang memuat tentang model buku administrasi desa yang akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk diaplikasikan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan

##### a. Sosialisasi

Langkah pertama yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan adalah mengkomunikasikan sebagai upaya untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan kegiatan ini kepada kedua pemerintah desa mitra. Kegiatan sosialisasi ini dijadikan sebagai salah satu tahapan penting dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PKM. Kegiatan sosialisasi lebih difokuskan pada pemberian informasi dan pemahaman tentang pentingnya kegiatan yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penatausahaan administrasi desa. Kegiatan tersebut menyangkut transformasi gambaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi aparatur desa.

##### b. Proses Pembelajaran (Teori)

Tahapan selanjutnya setelah sosialisasi adalah pelaksanaan kegiatan yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan proses pembelajaran berupa penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan praktek atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap aparatur desa yang menjadi kelompok sasaran kegiatan ini. Materi yang akan diajarkan meliputi teori dan praktik. Metode pembelajaran adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, pendampingan dan praktek. Berbagai alat bantu ajar yang akan digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran berupa modul dan LCD. Bertolak dari dua permasalahan utama yang akan ditanggulangi bersama adalah:

- Informasi umum tentang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014.
- Pengetahuan umum tentang administrasi pemerintahan desa. Dalam kegiatan ini akan diberikan pengetahuan tentang model-model buku administrasi desa. Sekaligus juga akan



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
ISBN: 978-602-555-459-9**

diberikan pengetahuan tentang cara pengisian model-model buku administrasi desa, beserta pengklasifikasiannya. Pelatihan ini disertai dengan praktek agar supaya aparatur desa langsung dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh melalui pengisian model-model buku administrasi desa tersebut.

- Pengetahuan tentang model buku administrasi desa. Dalam kegiatan ini aparatur desa akan diberikan pengetahuan bagaimana menata usahakan administrasi desa secara lengkap rapih dan tertib.

c. Implementasi Model Administrasi Desa

Implementasi pengetahuan tentang berbagai model administrasi desa merupakan rangkaian kegiatan mewujudkan pengetahuan yang telah diperoleh sehingga memberi dampak yang bermanfaat. Proses implementasi model administrasi desa merupakan salah satu kunci untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa mitra. Dalam mengimplementasikan model-model-model administrasi desa yang ditawarkan, maka akan dilakukan pendampingan dan monitoring terhadap aparatur desa dalam mengaplikasikannya.

3. Pemantapan Program Kerja dan Evaluasi

Tahapan pemantapan program kerja dan evaluasi merupakan tindakan yang didasarkan pada hasil evaluasi pada setiap tahapan program kegiatan yang telah dilakukann. Untuk memantau kemajuan program kerja, dilakukan dengan cara mengevaluasi secara langsung aktivitas kerja aparatur desa mitra sejak pengenalan, sampai pada implementasi. Aspek yang dievaluasi mencakup respons, tindakan nyata melalui perilaku kerja setiap aparatur serta penguasaan pengetahuan (teori dan praktek) yang dirumuskan dalam dua kriteria keberhasilan yaitu berdasarkan output, outcome atau dampak dari pelaksanaan program PKM Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka proses evaluasi tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali (sebelum, sementara proses, dan akhir) dengan alasan agar jika belum mencapai tingkat keberhasilan maka perlu memperbaiki atau melengkapi hal-hal yang dianggap menjadi faktor penyebab kegagalan atau kurangberhasilan kegiatan tersebut.

Kriteria atau indikator berdasarkan output kegiatan PKM dalam rangka memecahkan masalah mitra diukur berdasarkan: a. Terlaksananya proses fasilitasi, adanya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia tentang administrasi pemerintahan desa, b. Termotivasinya aparatur desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa secara lengkap, rapih dan tertib, dan c. Terciptanya aparatur desa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menatausahakan administrasi

pemerintahan desa.

Kriteria keberhasilan berdasarkan outcome atau dampak kegiatan PKM ditentukan berarkan adanya: a. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa mitra dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi desa mitra, b. Peningkatan kemampuan untuk menatausahakan administrasi desa secara lengkap rapi dan tertib, dan c. Terciptanya budaya tertib administrasi di kalangan aparatur desa mitra.

*B. Hasil/Luaran yang Dicapai*

Sesuai solusi dan target luaran dalam kegiatan PKM ini ditargetkan, maka kegiatan ini telah menghasilkan model-model buku administrasi desa yang meliputi:

1. Buku Administrasi Umum (Model A1-A8)
  - MODEL A.1. Data Peraturan Desa
  - MODEL A.2. Data Keputusan Kepala Desa
  - MODEL A.3. Data Inventaris Desa
  - MODEL A.4. Data Aparat Pemerintah Desa
  - MODEL A.5. Buku Data Tanah Desa/Tanah Kas Desa
  - MODEL A.6. Data Tanah Di Desa
  - MODEL A.7. Buku Agenda
  - MODEL A.8. Buku Ekspedisi
2. Buku Administrasi Penduduk (Model B1-B4)
  - MODEL B.1. Buku Data Induk Penduduk
  - MODEL B.2. Buku Data Mutasi Penduduk
  - MODEL B.3. Buku Data Rekapitulasi Penduduk
  - MODEL B.4. Buku Data Penduduk Sementara
3. Buku Administrasi Keuangan Desa (Model C1-C3)
  - MODEL C.1.a. Anggaran Penerimaan
  - MODEL C.1.b. Anggaran Pengeluaran Rutim
  - MODEL C.1.c. Anggaran Pengeluaran Pembangunan
  - MODEL C.2. Buku Kas Umum
  - MODEL C.3.a. Buku Kas Pembantu Penerimaan
  - MODEL C.3.b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
  - MODEL C.3.c. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
4. Buku Administrasi Pembangunan (Model D1-D4)
  - MODEL D.1. Buku Rencana Pembangunan
  - MODEL D.2. Buku Kegiatan Pembangunan
  - MODEL D.3. Buku Inventaris Proyek
  - MODEL D.4. Buku Kader-Kader Pembangunan
5. Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (Model E1-E4)
  - MODEL E.1. Buku Data Anggota BPD
  - MODEL E.2. Buku Data Keputusan BPD
  - MODEL E.3. Buku Data Kegiatan BPD
  - MODEL E.4.a. Buku Data Agenda BPD
  - MODEL E.4.b. Buku Ekspedisi



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
ISBN: 978-602-555-459-9**

#### **IV. KESIMPULAN**

Aparatur desa mitra mengapresiasi positif kegiatan ini dan menyadari pentingnya penatausahaan administrasi secara teratur dan tertib. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini telah menghasilkan 32 model buku administrasi desa. Model-model buku administrasi desa yang dihasilkan, pengisiannya telah diujicobakan kepada aparatur desa mitra melalui mekanisme penyuluhan dan pendampingan. Aparatur desa telah memiliki kemampuan (kapasitas) dalam menatausahakan administrasi desa dengan menggunakan model-model buku administrasi desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Chambers, Robert, 1996, Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.  
Leibo, Jefta, 1995, Sosiologi Pedesaan: Mencari Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, Andi Offset, Yogyakarta.  
Hagul, Peter (Editor), 1992, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Dian Desa, Yogyakarta.  
Marbun, B.N., 2000, Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta.  
Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan & Penyeleenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta  
Rozak, Abdur, dkk, 2004, Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta.